

Paradigma Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam dan Paradigma Pembangunan di Indonesia

Muhammad Alyaafi

Prodi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara

yaficoffee90@gmail.com

Ryan Syahputra

Prodi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara

syahputrarilyan302@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya pemahaman mengenai paradigma dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan perspektif Islam. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis dan untuk mengetahui paradigma pembangunan yang berbasis perspektif Islam dan mengetahui paradigma pembangunan yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah pembangunan ekonomi mesti menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan konsisten sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Di Indonesia masih terjadi kemiskinan dan juga ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan. Yang di mana dengan mengikuti paradigma pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mampu menciptakan falah atau kesejahteraan. Ekonomi Islam yang berlandaskan ajaran syariah Islam menuntut kepada para pemeluknya untuk berlaku secara profesional dalam proses menampilkan kebenaran dan keadilan. Maka dari itu penelitian ini mengkaji Bagaimana paradigma pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dan juga pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci : Paradigma, Pembangunan Ekonomi, Syariah

ABSTRACT

This research was motivated by a lack of understanding regarding economic paradigms and development in accordance with an Islamic perspective. The aim of this research is to analyze and find out the development paradigm based on an Islamic perspective and find out the existing development paradigm in Indonesia. The result of this research is that economic development must create a balance between individual interests and the interests of society, goodness that is balanced and consistent in accordance with the rules of the Islamic religion. In Indonesia there is still poverty and inequality in income distribution. Which by following a development paradigm that is in accordance with Islamic principles is able to create falah or prosperity. Islamic economics, which is based on the teachings of Islamic sharia, requires its adherents to act professionally in the process of displaying truth and justice. Therefore, this research examines the economic development paradigm from an Islamic perspective and also the economic development that occurs in Indonesia.

Keywords: *Paradigm, Economic Development, Sharia*

PENDAHULUAN

Pemerintah dan bangsa Indonesia telah banyak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh orde baru. Namun pada kenyataannya masih belum membuahkan hasil yang optimal karena masih belum memihak kepada masyarakat banyak. Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif) dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam

disiplin intelektual. Sedangkan menurut (Kartasasmita, 1997) Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi.

Dalam sejarahnya Indonesia telah mengimplementasikan beberapa paradigma pembangunan yang ada di dunia dengan ciri khasnya masing-masing, mulai dari paradigma liberal yang erat kaitannya dengan modernisasi dan paradigma Marxisme dengan konsep pemberdayaannya Paradigma pembangunan yang dijalankan

tersebut merupakan proses adaptasi terhadap spirit zaman yang berkembang.

Schumpeter mengungkapkan perbedaan yang lebih lazim antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara maju sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara berkembang (Jhingan, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk bisa meningkat. Di sini, terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum (Okan dan Richardson, 1961). Pertama, pembangunan ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang. Pendapatan nasional riil adalah output barang-barang jadi dan jasa di negara tersebut, ada dalam bentuk riil artinya bukan fiktif. Jadi, perubahan harga harus dikesampingkan dalam menghitung pendapatan nasional riil. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena pada perekonomian yang sedang dalam keadaan berkembang keanekaragaman harga bisa dipastikan terjadi, sehingga dalam jangka panjang mengakibatkan kenaikan pendapatan riil sedangkan kenaikan jangka pendek dalam

pendapatan nasional tidak disebut sebagai pembangunan ekonomi.

Kedua, Kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang, pendapat para ahli ekonomi tidak jauh berbeda dalam menjelaskan pembangunan ekonomi. Menurut mereka pembangunan ekonomi dikatakan naik apabila terjadi kenaikan output riil per kapita, hal ini dimungkinkan bahwa bagi perkembangan ekonomi tingkat kenaikan pendapatan riil harus lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Di samping itu, ada kemungkinan lain yang terjadi di saat pendapatan per kapita tinggi namun yang terjadi kemiskinan semakin bertambah mungkin hal ini disebabkan pendapatan hanya mengalir di kalangan orang kaya saja. Hal ini yang menyebabkan definisi ini menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama untuk mencari solusi yang tepat agar teori ini tidak rancu dengan keadaan riilnya.

Ketiga, Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik kesejahteraan ekonomi, sebagai contoh perkembangan ekonomi dipandang sebagai proses di mana pada saat pendapatan per kapita bertambah dibarengi dengan penurunan kesenjangan masyarakat dan pemenuhan keinginan masyarakat secara menyeluruh, namun yang terjadi justru di saat pendapatan per kapita tinggi kesenjangan juga tinggi, artinya ada

ketimpangan dalam penyaluran distribusi barang dan jasa. Perkembangan ekonomi seharusnya merupakan sebuah wujud perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus menerus dan berjangka panjang dan lancarnya distribusi barang dan jasa sehingga kesenjangan dapat berkurang secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai metode pengumpulan data untuk menelusuri peristiwa yang hendak dikaji. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

PEMBAHASAN

A. PARADIGMA PEMBANGUNAN

Tahap pembangunan di negara-negara berkembang memiliki pola metode, model dan paradigma yang berbeda. Di antara paradigma pembangunan di negara-negara berkembang ialah :

1. Paradigma modernisasi muncul pasca perang dunia ke-2 yaitu ketika pasar dalam Amerika mengalami kejenuhan dan terancam kehilangan mitra dagang. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1946

atau 1947 pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Mharsall Plan. Program ekonomi skala besar ini bertujuan untuk membantu dan memperbaiki perekonomian negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa pasca perang.

2. Paradigma ketergantungan, latar belakang negara-negara berkembang yang mendapat bantuan pinjaman dari negara-negara maju menimbulkan ketidakpuasan terhadap paradigma modernisasi sehingga muncul paradigma dependensi. Menurut paradigma ini penyebab negara-negara berkembang mengalami keterbelakangan ialah negara-negara maju menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya.

3. Paradigma sistem dunia, paradigma ini muncul sebagai kritik atas paradigma modernisasi dan dependensi. Pencetus teori ini (Immanuel Wallertein, 1974), memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia, dan integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan oleh faktor ekonomi daripada kepentingan politik.

Paradigma Baru Dalam Pembangunan

Pada akhir tahun 1960-an banyak negara-negara yang sedang berkembang menjadi bahwa pertumbuhan tidak identik dengan

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga melampaui negara-negara maju bisa saja dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di perdesaan, distribusi pendapatan dan ketimpangan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat diperlukan tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Beberapa paradigma baru dalam pembangunan kemudian berkembang seperti paradigma pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok dan pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dan paradigma syariah (syariah paradigm).

a. Strategi Pertumbuhan Dengan Distribusi

Pertumbuhan ekonomi yang sampai sekarang masih menjadi target kecapaian utama pemerintah semakin dituntut untuk perkalian sosial melalui pemerataan ekonomi di desa dan di kota. Strategi pertumbuhan dengan distribusi menganjurkan agar negara sedang berkembang tidak hanya fokus untuk mempertinggi pendapatan namun juga harus memperhatikan distribusi pendapatan

tersebut kepada seluruh anggota masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan investasi modal manusia tetap perbaikan sektor pertanian maupun sektor informal.

b. Strategi Kebutuhan Pokok

Pada strategi ini kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang harus selalu dipenuhi. Yang di mana menurut damari kebutuhan pokok meliputi kebutuhan akan bahan makanan, Perumahan, sandang serta barang-barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan partisipasi. Jadi dengan demikian strategi pemenuhan kebutuhan pokok telah mencoba masukkan semacam jaminan agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan.

c. Strategi Pembangunan Mandiri

Strategi Pembangunan Mandiri merupakan antitesis dari paradigma dependensi yang menekankan pentingnya kemandirian dalam pembangunan tanpa campur tangan dari luar.

d. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus

dipecahkan oleh pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Paradigma Syariah (Syariah Paradigm)

Paradigma syariah muncul seiring dengan semangat umat Islam untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dalam paradigma Syariah kesejahteraan masyarakat akan tercapai Bila Seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah. Meskipun belum ada satu negara yang menerapkan paradigma syariah secara sempurna namun banyak ekonomi yang meyakini bahwa paradigma Syariah akan mampu menyelesaikan masalah-masalah perekonomian.

B. FASE EKONOMI PEMBANGUNAN

Pertama, fase klasik yaitu fase pembangunan yang dikembangkan oleh ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Mulus dan Jhon Stuart Mill. Pada fase ini menyerahkan aturan dan penguasaan ekonomi kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran sedangkan pemerintah tidak campur tangan. Harga terbentuk atas dasar mekanisme pasar dengan sendirinya yang akan mempengaruhi produksi, alokasi, pendapatan dan konsumsi.

Kedua, fase keynessian yaitu pada fase ini Keynes mengusulkan untuk meninggalkan ideologi *laissez faire* dan pemerintah harus lebih banyak campur tangan dalam mengendalikan dan mempengaruhi perekonomian sementara pengusaha swasta diberi kepercayaan dalam kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi.

Ketiga, fase neoklasik yaitu pada fase ini bahwa liberalisasi pasar dan pengurangan campur tangan pemerintah dan perekonomian sangat penting untuk menyelesaikan masalah negara-negara berkembang. Aliran neoklasik yang dipelopori oleh Alfred Marshall dan Leon Walras ini, meyakini bahwa laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dalam penawaran faktor-faktor produksi yang tingkat teknologi dan rasio model produksi yang tidak bersifat konstan.

C. PARADIGMA ISLAM TENTANG PEMBANGUNAN

Kami mengutip dari berbagai tokoh mengenai paradigma Islam tentang pembangunan.

1. Paradigma Pembangunan Menurut Ibn Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun untuk menciptakan kesejahteraan maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan dengan

memperhatikan beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membuat sebuah lingkaran yang disebut oleh M. Umer Chara dengan daur keadilan atau *cycle of equity*.¹ Komponen-komponen tersebut adalah kekuatan penguasa (al-mulk), syariah (hukum), rakyat (ar-rijal), kekayaan (al-mal), pembangunan (al-imarah), dan keadilan (al-'adl). Semua variabel tersebut bekerja dalam sebuah lingkaran yang dinamis saling tergantung dan saling mempengaruhi dan menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban atau negara.

2. Paradigma Pembangunan Menurut Khursid Ahmad

Menurut Khurshid Ahmad filosofis pembangunan ekonomi terdiri dari tauhid, keadilan khalifah dan tazkiyah :

1. Tauhid Lubuk Iyah merupakan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi.
2. Keadilan, yaitu pembangunan harus meliputi semua aspek sehingga tidak pincang dan mampu menciptakan pemerataan.
3. Khalifah, menegaskan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang

pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

4. Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah sesama dan alam lingkungan masyarakat dan negara.²

3. Paradigma Pembangunan Menurut Umer Chapra

Menurut Umer Chapta paradigma Islam tentang pembangunan dimulai dengan menggunakan konsep Islamic worldview yang didasarkan pada tiga konsep fundamental yaitu tauhid (keesaan Allah SWT), khalifah, dan keadilan ('adalah). Tauhid mengandung intilasi bahwa alam semesta ini secara sadar atau sengaja dibentuk dan diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Esa. Selanjutnya Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah juga sekaligus khalifatullah fil ardh yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Perintah untuk melaksanakan keadilan di sampai terletak pada dan kewajiban beragama juga menyahutin tuntutan fitrah manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai prinsip keadilan. Karena merupakan respon tuntutan fitrah maka setiap tindakan yang menyimpang dari keadilan selalu

¹ Dr. M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi, (Jakarta : Tazkia Institute,2001), h. 127.

² Khurshid Ahmad, Economic Development i an Islamic Framework, dalam Studies Islamic Economics (Jeddah : King Abdul Azizi University, 1976), h. 178-179.

mendapatkan tantangan bukan saja dari dalam tetapi juga dari luar diri manusia. Pembangunan dalam Islam juga harus mengacu pada tujuan Syariah (maqasyid syariah) yang memelihara iman (faith), hidup (life), nalar (intellect), keturunan (posterity) dan kekayaan (wealth) sehingga tercapai Falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat.³

Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan(iman) yang pada akhirnya dengan kekayaan (property). Yang pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan tindakan kebijakan sebagai solusi bagi pembangunan yang disertai keadilan dan stabilitas yaitu :

1. Memberi kenyamanan kepada faktor manusia
2. Mengurangi konsentrasi kekayaan
3. Melakukan restrukturisasi ekonomi
4. Melakukan restrukturisasi keuangan
5. Perencanaan kebijakan strategis

Kutipan kami dari buku Umer Chapra, Paradigma Islam tidak sekularis, netral

nilai, materialis, dan sosial Darwinis. Ia didasarkan pada sejumlah konsep yang menjadi akar dari doktrin-doktrin ini. Ia memberikan tekanan khusus kepada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosioekonomi dan, tidak seperti paradigma mitranya baik Marxis maupun kapitalis, ia tidak hanya mengandalkan negara atau pasar dalam merealisasikan visinya. Ia justru mengandalkan peran integral dari nilai-nilai dan lembaga-lembaga, pasar, keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin falah atau kesejahteraan semua orang. Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan begitu jelas mengungkapkan paradigma Islam, sehingga nyaris tak ada kekaburan padanya. Kalaupun terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan itu hanya pada masalah rinci (kecil). Demikianlah Hodgson dengan tepat mengatakan, "Tradisi agama Islam, meskipun beragam, namun tetap menyatu, dan unik. Pada analisis final dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin melindungi secara efektif kepentingan sosial tanpa bantuan nilai-nilai moral, dan penciptaan suatu kekuatan yang dapat memotivasi dan suatu lingkungan yang tepat bagi pemberlakuannya. Dengan cara ini, beban di pundak pemerintah untuk

³ Amiur Nuruddin, Jamuan Ilahi : Pesan Alquran dalam Berbagai Dimensi Kehidupan, (Bandung : Cita Pustaka , 2007), h. 7-21

melindungi kepentingan sosial dapat dikurangi.⁴

Kutipan kami dari Jurnal Syamsuri, secara epistemologi pembangunan dalam perspektif Islam yaitu peningkatan kesadaran insan atas tanggung jawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah mengikut urutan keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana dan adil. Pembangunan ini dapat diukur dengan empat hal utama yaitu kebebasan, keadilan, akhlak dan moral, dan kebahagiaan⁵. Konsep perbedaan harta benda menurut ekonomi liberal disebabkan adanya penindasan dan eksploitasi manusia yang lebih berkemampuan, lebih berpeluang atau lebih berkuasa. Sedangkan dalam Islam perbedaan itu telah Allah SWT jelaskan dalam Firmannya dalam surah al-An'am ayat 165, yaitu bertujuan sebagai alat Allah SWT menguji manusia dan alat manusia untuk mensyukuri nikmat-Nya.⁶

Begitu halnya konsep keadilan, mengikut falsafah pembangunan konvensional keadilan lebih berdasarkan pada nilai-nilai materialisme secara kuantitas. Sedangkan

Islam melihat keadilan apabila manusia dapat mempertahankan rahmat kepada Allah SWT. Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan kekal, kebaikan yang selaras dengan kaidah-kaidah agama Islam, sehingga kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu komunitas saja.⁷

Kutipan kami dari Jurnal Agung Eko Purwono, Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan

⁴ Dr. M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2001), h. 48-53.

⁵ Wan Mohd Nor Wan Daud, Pembangunan di Malaysia ke arah satu kefahaman baru yang lebih sempurna, 2019.

⁶ Muhammad Syukri Salleh, Pembangunan berteraskan Islam, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987), hal. 49.

⁷ Syamsuri, Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, Juli - Desember 2016, P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127.

kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transcendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syariah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma', qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih.⁸

D. PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (growth). Pertumbuhan ekonomi (growth) adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang juga menggunakan teori ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia atas dasar harga konstan Pp 2.000 pada 2013 mencapai Rp2.770,3 triliun, naik

Rp151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 (Rp2.618,9 triliun). Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB 2013 naik sebesar Rp854,6 triliun, yaitu dari Rp8.229.4 triliun pada 2012 menjadi sebesar Rp9.084,0 triliun pada 2013 (BPS, 2013).

Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan setiap tahun meski penurunannya semakin lambat, tingkat kemiskinan nasional dalam periode 2011 hingga 2013 membaik dari 12,36 persen pada September 2011 menjadi 11,37 persen dari total populasi Indonesia Maret 2013. Namun dalam waktu yang sama kesenjangan penduduk miskin dengan penduduk kaya tidak berubah, kesenjangan masih sama dari 2011 hingga 2013 yakni dari 0,41 masih sekitar 0,4, memperbaiki rasio ini lebih sulit daripada mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat menjadi sebuah keprihatinan kita bersama dan bisa menjadi sebuah gambaran kecil bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa terintegrasi secara baik antara sektor moneter dan sektor riil sehingga menimbulkan kesenjangan yang tinggi karena disebabkan distribusi yang juga tidak merata. Kesenjangan ini juga terlihat dari berbagai daerah di Indonesia dengan

⁸ Agung Eko Purwono, Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2013.

banyaknya daerah yang masih banyak tertinggal dari daerah lainnya. Kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain yang bermunculan, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuan daya beli masyarakat menurun.

Krisis keuangan global saat ini menjadi salah satu bukti kegagalan paradigma pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi menjadi penting untuk diprioritaskan agar dapat diperbarui. Bagaimana mengurangi ketimpangan dan kesenjangan tidak hanya antara kaya dan miskin, melainkan juga kesenjangan antar- daerah dalam kesediaan infrastruktur yang memadai dan antar sektor produksi dan seterusnya.

Hal ini diharapkan paradigma pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan (growth), melainkan juga melihat ukuran pemerataan dalam distribution. Namun dari semua hal tersebut Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju, sebagaimana

tergambar dalam Millennium Development Goals (MDGs) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).⁹

KESIMPULAN

Pada kenyataannya paradigma pembangunan ekonomi liberal telah menjadi acuan konsep maupun teori ekonomi pembangunan di berbagai belahan dunia. Tradisi baru yang mempercayai bahwa manusia mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan ekonominya dengan tanpa harus melibatkan aspek akhlak maupun etika dalam berbisnis maka agama mesti dipisahkan daripada aktivitas ekonomi. Akan tetapi hingga saat ini kemiskinan, kerusakan alam dan berbagai bentuk ketimpangan sosial ekonomi dan politik terjadi di mana-mana, bahkan masih banyak persoalan yang terjadi dan tidak kunjung selesai dari dampak sistem kapitalis yang kotor dan menodai fitrah manusia. Maka dari kegagalan Konsep ini menjadi suatu pengajaran bagi ekonomi muslim yang menghadirkan Satu teori konsep baru yang bersumber kepada Alquran maupun hadis. Yaitu dalam sistem ini Islam memberikan lima pendekatan

⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Kencana : Jakarta, 2017, h. 8-11.

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pembangunan ekonomi yaitu dengan dasar-dasar falsafahnya tauhid, rububiyah, khalifah, 'adalah dan tazkiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Eko Purwono, *Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2013.

Amiur Nuruddin, *Jamuan Ilahi : Pesan Alquran dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*, Bandung : Cita Pustaka, 2007

DR. Isnaini Harahap, MA, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdinipliner*, Medan : Perdana Publishing, 2018

Dr. M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Tazkia Institute, 2001

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Kencana, 2015

Khurshid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework*, dalam *Studies Islamic Economics* (Jeddah : King Abdul Azizi University, 1976), h. 178-179.

Muhammad Syukri Salleh, *Pembangunan berteraskan Islam*, Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987

Wan Mohd Nor Wan Daud, *Pembangunan di Malaysia ke arah satu kefahaman baru yang lebih sempurna*, 2019.

Syamsuri, *Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam*, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, Juli - Desember 2016, P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127.